

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016
(Studi Di Desa Baluara Kecamatan Batukara Kabupaten Muna)

Oleh:

Wiwin Fitriyani

(Mahasiswa S1 Jurusan PPKn FKIP UHO)

Misran Safar

(Dosen Jurusan PPKn FKIP UHO)

Andi Syahrir P

(Dosen Jurusan PPKn FKIP UHO)

*Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, Kendari,
93232 Sulawesi Tenggara, Indonesia*

Abstrak: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana Desa tahun 2016 di Desa Baluara Kecamatan Batukara Kabupaten Muna terdiri atas empat bentuk antara lain: perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan kepala Desa mengadakan musyawarah bersama tokoh masyarakat, pemerintah Desa, anggota BPD untuk membahas penggunaan atas anggaran alokasi dana Desa tahun 2016; tahap pelaksanaan kepala Desa sebagai penguasa anggaran terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan membentuk tim pelaksana kegiatan; tahap pertanggungjawaban kepala Desa bertanggungjawab atas anggaran yang digunakan yakni pertanggungjawaban tertulis dalam bentuk laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pengelolaan alokasi dana Desa tahun 2016; dan tahap pengawasan yang melaksanakan pengawasan adalah kepala Desa, BPD, dan masyarakat sedangkan pemerintah Kabupaten/Kota melalui laporan pertanggungjawaban.

Kata Kunci: *Pengelolaan Alokasi Dana Desa*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa sejalan dengan asas pengaturan Desa yakni asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Desa telah diberikan wewenang oleh pemerintah Kabupaten/Kota, untuk mengatur, mengelola urusan pemerintahan tanpa ada intervensi dari pihak lain, sehingga Desa mengandalkan sumber daya manusia yang ada di Desa. Dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada Desa, maka Desa berkewajiban mengatur dan mengelola sendiri anggaran alokasi dana Desa. Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dari anggaran pendapatan dan belanja negara bahwa dana Desa adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana

perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut, maka dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa dapat mewujudkan pengelolaan yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Sehingga Anggaran Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang sesuai dengan kebutuhannya, yang dapat dinikmati masyarakat Desa, serta memelihara kesinambungan pembangunan yang ada di Desa. Dimana tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa dapat ditingkatkan.

Berdasarkan hasil observasi awal kondisi *real* di Desa Baluara Kecamatan Batukara Kabupaten Muna jumlah alokasi dana Desa tahun 2016 yang di terima Desa Baluara senilai 144.800.000.00 dan mengenai penggunaan alokasi dana Desa tahun 2016 digunakan sebagai penyelenggaraan pemerintahan Desa yang terdiri dari (pembayaran penghasilan dan tunjangan, operasional kantor Desa, operasional BPD dan operasional RT/RW), pelaksanaan pembangunan Desa (renovasi kantor Desa), pembinaan kemasyarakatan (pemuda dan olahraga, organisasi perempuan/PKK, lomba Desa tingkat kecamatan), dan pemberdayaan masyarakat (pelatihan kepala Desa dan perangkat, peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).

Dalam pemerintahan Kepala Desa dapat berfungsi antara lain sebagai penggerak partisipasi masyarakatnya, pelaksana koordinasi jalannya pemerintahan, pelaksana tugas dari pemerintah yang diatasnya, pelaksana pengawasan terhadap pembangunan dan pembinaan kehidupan di Desa. Disamping fungsi tersebut, Kepala Desa juga dapat melaksanakan unsur-unsur pemerintahan lainnya yang tidak terdapat urusan rumah tangganya sendiri. Dengan demikian peranan kepala Desa adalah sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utamanya pemerintahan dan pembangunan di Desa. Kepala Desa juga bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya dan gotong royong dalam masyarakat (Sarapin, 1999).

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti, pembuatan peraturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerjasama antar Desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum Desa seperti, jalan Desa, jembatan Desa, irigasi Desa, pasar Desa, dan urusan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat (Soemantri, 2014). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 10 menjelaskan keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pendapatan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 bersumber dari: a) pendapatan asli Desa terdiri dari atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c) bagian dari hasil pajak

daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d) alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 pasal 1 ayat 9 bahwa Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi alokasi khusus. Maksud diberikannya alokasi dana Desa adalah untuk membiayai program pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Rochmansjah, (2014) tujuan yang akan dicapai dengan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: 1) menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 2) meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat; 3) meningkatkan pembangunan infrastruktur perDesaan; 4) meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial; 5) meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 6) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 7) mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan 8) meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Penggunaan alokasi dana Desa adalah ADD yang diterima pemerintah Desa 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dan BPD seperti biaya operasional pemerintah Desa, biaya operasional BPD, dan biaya operasional tim pelaksana ADD. Sedangkan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa seperti pembangunan sarana dan prasarana ekonomi Desa, pemberdayaan dibidang pendidikan kesehatan dan penguatn gender, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat Desa (Rochmansjah, 2014).

Ada 4 (empat) prinsip dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- 1) pengelolaan ADD merupakan bagian integral dari pengelolaan APBDDesa;
- 2) seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa;
- 3) semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum;
- 4) dilaksanakan secara ekonomis, efektif, efisien, terarah dan terkendali, (Rochmansjah, 2014).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah proses atau cara menjalankan anggaran Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah Desa untuk membangun Desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Menurut Kila, (2017) Alokasi Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat, yang disalurkan dari Kabupaten melalui Kas Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, alokasi dana Desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali. Kegiatan yang didanai oleh alokasi dana Desa direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pembangunan Desa. Mekanisme pengelolaan keuangan alokasi dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Pengelolaan alokasi dana Desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi: 1). Perencanaan; 2). Pelaksanaan; 3). Petanggungjawaban; dan 4). Pengawasan alokasi dana Desa. (Riskawati, 2016).

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan pada saat rencana dibuat.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Anggaran Desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh Desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh Desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a) merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi, dan sasaran yang sudah ditetapkan
- b) merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan
- c) mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun
- d) menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi, (Sujarweni, 2015).

2. Pelaksanaan (*implementasi*)

Dalam pelaksanaan anggaran Desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa:

- a) pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya
- b) rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh kepala Desa

- c) pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, (Sujarweni, 2015).

3. Pertanggungjawaban (*akuntabilitas*)

Menurut Sabeni dan Ghazali (2001), menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2002) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, Sedangkan menurut Nordiawan (2006) akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada ientitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka, (Sujarweni, 2015).

Menurut Sujarweni, (2015) pertanggungjawaban terdiri dari: Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

4. Pengawasan (*monitoring*)

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan tahap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan alokasi dana Desa secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah meliputi pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepala Desa kepada para tim pelaksana pengelolaan alokasi dana Desa dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu surat pertanggungjawaban alokasi dana Desa.

Dari uraian diatas diketahui bahwa pengelolaan alokasi dana Desa belum berjalan secara maksimal, dimana kemampuan pemerintah Desa dan aparat masih rendah dalam hal ini sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah Desa, aparat Desa dan masyarakat Desa setempat yang berhubungan dengan pengelolaan alokasi dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Berdasarkan hal tersebut penulis pengambil judul penelitian: "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 (Studi Di Desa Baluara Kecamatan Batukara Kabupaten Muna)". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Baluara Kecamatan Batukara Kabupaten Muna?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *expo facto* dengan pendekatan kualitatif yaitu memberikan gambaran secara detail sesuai dengan fakta yang ada di lokasi penelitian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Baluara Kecamatan Batukara Kabupaten Muna. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, bendahara, Ketua

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 2 orang anggota BPD, 3 orang anggota TPK, dan 2 orang tokoh masyarakat. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) Penelitian kepustakaan; 2) Penelitian lapangan, terdiri dari: wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan data kualitatif yakni *Data Reduction* (Reduksi Data); *Data Display* (Penyajian Data); dan *Conclusion Drawing/Verivication* (Penarikan Kesimpulan). Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016

1. Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap perencanaan dalam hal ini perencanaan alokasi dana Desa tahun 2016 di Desa Baluara berawal dari musyawarah Desa. Perencanaan alokasi dana Desa dilakukan dengan menjaring usulan-usulan masyarakat yang dianggap paling mendesak atau dibutuhkan pada tahun itu melalui musyawarah Desa. Adapun tujuan dilaksanakannya musyawarah tersebut adalah membahas perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa dan pembangunan Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang dilaksanakan di kantor Desa setempat. Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran alokasi dana Desa khususnya masyarakat yang berlokasi di Desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/ aspirasi yang berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal, dimana kepala Desa, BPD, dan tokoh masyarakat melaksanakan Musrembangdes dan pembentukan tim pelaksana kegiatan akan tetapi anggaran yang ada tidak direncanakan dengan baik sehingga tidak proporsional seimbang antara biaya operasional Desa dan BPD, dan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan pengelolaan alokasi dana Desa sudah sesuai dengan pendapat Sujarweni (2015) antara lain bahwa anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi, dan sasaran yang sudah ditetapkan; merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan; mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun; menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

2. Pelaksanaan (*Implementasi*)

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Muna No. 15 tahun 2012 tentang pengelolaan alokasi dana Desa. Alokasi Dana Desa di peruntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah Desa dan BPD, serta 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan atau program yang telah direncanakan. Sehingga pemerintah Desa Baluara membentuk sebuah tim dengan sebutan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang

bertugas untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh alokasi dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian pada tahap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan pendapat (Sujarweni 2015) antara lain bahwa pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya; rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh kepala Desa; dan pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Sedangkan pengelolaan alokasi dana Desa belum maksimal, karena Anggaran yang telah disediakan belum menunjukkan penggunaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan, dimana ketentuan penggunaan alokasi dana Desa belum sesuai dengan pendapat Rochmansjah (2014) adalah 30% alokasi dana Desa dipergunakan untuk biaya operasional pemerintah Desa, biaya operasional BPD, dan 70% alokasi dana Desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa seperti pembangunan sarana dan prasarana ekonomi Desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengarusutamaan gender, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat Desa.

3. Pertanggungjawaban (*Akuntabilitas*)

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah Desa. Pertanggungjawaban alokasi dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Selama dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan uang ADD. Dengan demikian apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dapat meringankan/ mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan ADD yang harus disusun oleh bendahara.

Berdasarkan hasil penelitian tahap pertanggungjawaban bahwa kepala Desa, bendahara dan TPK sudah bertanggungjawab terhadap pengelolaan alokasi dana Desa tahun 2016 dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis berbentuk fisik. Sesuai dengan pendapat Sujarweni (2015) bahwa pertanggungjawaban terdiri dari kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat.

4. Pengawasan (*Monitoring*)

Pada tahap pengawasan yang dilakukan adalah mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah dibuat dan aturan yang berlaku maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat pada Desa Baluara telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, BPD dan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian pada tahap pengawasan adalah pengawasan atas program dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah baik dimana kepala Desa, BPD, dan masyarakat setempat ikut terlibat langsung dalam pengawasan pengelolaan alokasi dana Desa tahun 2016, sedangkan pemerintah kabupaten

melakukan pengawasan melalui laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa. Pengawasan pengelolaan alokasi dana Desa secara fungsional adalah pengawasan oleh aparat atau satuan organisasi pemerintah pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepala Desa kepada para tim pelaksana pengelolaan alokasi dana Desa, masyarakat dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu surat pertanggungjawaban alokasi dana Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Baluara Kecamatan Batukara Kabupaten Muna, bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Baluara Kecamatan Batukara Kabupaten Muna terdiri 4 (empat) tahap yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Tahap perencanaan adalah kepala Desa mengadakan musyawarah bersama perangkat, BPD, dan tokoh masyarakat dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan alokasi dana Desa; tahap pelaksanaan adalah kepala Desa sebagai kuasa pengguna anggaran dan membentuk tim pelaksana kegiatan yang akan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan; tahap pertanggungjawaban adalah kepala Desa, bendahara dan TPK bertanggungjawab terhadap pengelolaan alokasi dana Desa tahun 2016 dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis yang akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota; dan tahap pengawasan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan yang melakukan pengawasan adalah kepala Desa, BPD, dan masyarakat setempat.

Saran

Pengelolaan alokasi dana Desa yang dilakukan di Desa Baluara tahun 2016 pada tahap perencanaan, pelaksanaan sudah baik namun belum maksimal karena tidak proporsional seimbang antara biaya operasional Desa dan BPD, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban, dan pengawasan sudah baik dan maksimal.

1. Bagi Pemerintah Desa Baluara Kecamatan Batukara Kabupaten Muna perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola Alokasi Dana Desa sehingga proporsional seimbang antara biaya operasional Desa dan BPD dengan pemberdayaan masyarakat.
2. Bagi masyarakat, sebaiknya semua elemen masyarakat dapat berperan aktif terhadap dalam pengelolaan alokasi dana Desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya apabila hendak meneliti hal yang sama dengan penelitian ini, diharapkan metode penelitian yang digunakan dapat diperluas lagi dan dalam pengambilan data lebih ditingkatkan lagi, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai landasan atau literatur untuk penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Kila, Kristina Korniti. 2017. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*. (<http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/>) akses 4 Mei 2017

- Peraturan Bupati Kabupaten Muna No. 12 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupatem Muna www.hukumonline.com (akses 4 Mei 2017)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengeolaan Keuangan Desa www.hukumonline.com (akses 21 Januari 2017)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Desa*. Bandung : Fokus Media
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bandung : Fokus Media
- Riskawati, dkk. 2016. *Analisis Local Goverment Performance in Managing distribution of Village Funds (Case Study In Kalia Village, Talatako sub-district Tojo Una-Una District*. (<http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/>) akses 4 Mei 2017
- Rochmansjah, Heru, dkk. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus media
- Sarapin, 1999. *Penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan di Desa dan masalah Kepemimpinan*. Jakarta : CV Rajawali
- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Soemantri, Trisantonno. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Bandung: Fokus Media